



PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI INDONESIA, EFEK *CROWDING IN* ATAU *CROWDING OUT*?

Grace Gabetini¹ Riatu M. Qibthiyah²

Article history:

Submitted: 31 Desember 2024

Revised: 18 Januari 2025

Accepted: 20 Januari 2025

Keywords:

Crowding Effect;

Social Enterprises;

Village Owned Enterprises;

Village Unit Cooperative;

Kata Kunci:

Badan Usaha Milik Desa;

Efek *Crowding*;

Koperasi Unit Desa;

Perusahaan Sosial;

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia, Depok,
Indonesia

Email:

gabetinigrace@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of establishing Village-Owned Enterprises (BUMDes) on the existence of Village Unit Cooperatives (KUD) in Indonesia. In the context of rural economic development, BUMDes are expected to empower rural communities and enhance economic self-reliance. However, the presence of BUMDes also creates competition for pre-existing business entities in villages, particularly KUD, which have long served as a cornerstone of rural economies. This research employs a quantitative approach with fixed-effect panel data regression analysis, integrating secondary data from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Finance for the period of 2014 to 2021. The results of the study indicate that the establishment of BUMDes has the potential to create a crowding-in effect for KUD through healthy competition that promotes the continued presence of KUD in Indonesia. These findings provide valuable insights for the development of more effective and sustainable rural economic policies, as well as encouraging collaboration between BUMDes and KUD to address the complex economic challenges at the village level.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan, BUMDes diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kemandirian ekonomi perdesaan. Namun, keberadaan BUMDes juga menimbulkan persaingan bagi entitas bisnis terdahulu di desa yakni KUD, yang telah lama berfungsi sebagai pilar ekonomi pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel *fixed effect*, mengintegrasikan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan untuk periode 2014 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian BUMDes berpotensi memberikan potensi efek *crowding in* bagi KUD dalam hal iklim kompetisi sehat yang mendorong keberadaan KUD di Indonesia. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi pedesaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mendorong kolaborasi antara BUMDes dan KUD untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks di tingkat desa.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia²

Email: rqibthiyah@gmail.com²

PENDAHULUAN

Implementasi ekonomi kerakyatan dilandasi pada pertumbuhan dan pembangunan masyarakat pada lapisan kelas bawah dan pedesaan. Hal ini dikarenakan rakyat pedesaan merupakan lapisan masyarakat yang rawan terhadap kemiskinan. Saat ini jumlah penduduk miskin di pedesaan masih didapati jauh lebih banyak dari perkotaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), persentase penduduk miskin per Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau setara 25,90 juta orang dengan rincian persentase penduduk miskin di kota 7,29 persen sementara di desa sebesar 12,22 persen. Walaupun kemiskinan menurun, namun penduduk miskin masih menumpuk di pedesaan yang terlihat dari jumlah penduduk miskin yang masih jauh lebih tinggi daripada perkotaan.

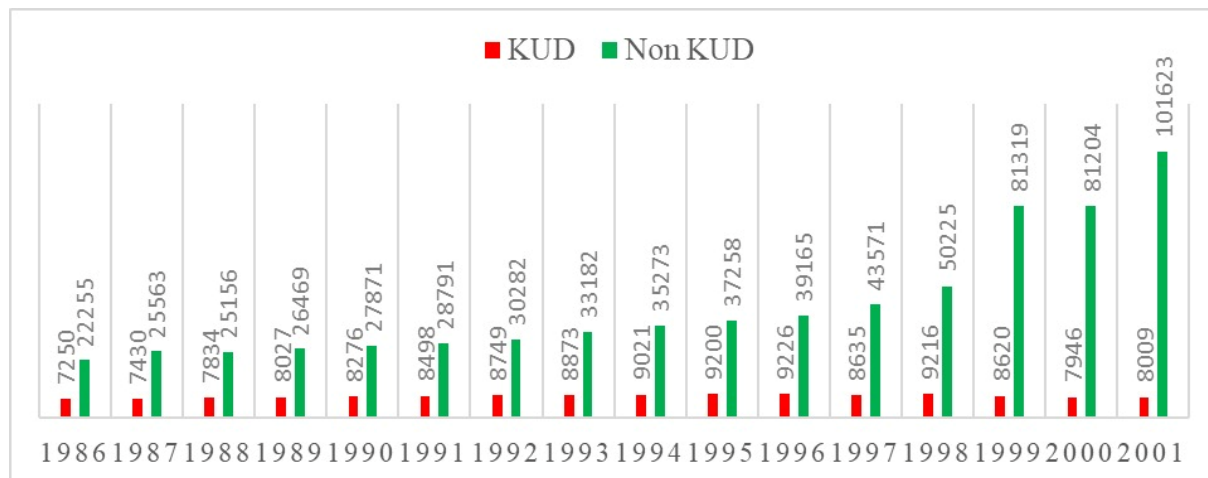
Kemiskinan di pedesaan salah satunya terjadi dari dipangkasnya proses partisipasi dan keterlibatan rakyat desa, yang bersumber dari hak berdaulat desa atas pembangunan aspek kehidupannya. Partisipasi rakyat miskin dalam proses pembangunan dan tata kelola ekonomi desa masih rendah (Tifa Foundation, 2018). Oleh karena itu, partisipasi rakyat desa dalam proses pembangunan di desa perlu diwadahi dalam kelembagaan yang jelas dan memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat. Menurut Pranadji (2016) kerapuhan kelembagaan perekonomian pedesaan memiliki peran besar dalam mengganjal perkembangan perekonomian pedesaan. Jika kelembagaan ekonomi suatu masyarakat dibiarkan rapuh, maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi apapun tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” kemajuan ekonomi yang tangguh.

Keberadaan kelembagaan ekonomi lokal desa sangat penting, sebab pada aktivitas keseharian yang berkaitan dengan ekonomi, rakyat desa masih membutuhkan kehadiran lembaga ini dalam memecahkan berbagai masalah. Lembaga ekonomi lokal desa diharapkan mampu berperan sebagai pondasi penguatan ekonomi rakyat desa. Sebagai contoh, masalah pelayanan kredit, penyebaran inovasi pertanian, masalah pemasaran produk desa dan lainnya yang bisa diakomodasi oleh lembaga ekonomi desa. Selain itu juga lembaga ekonomi lokal dapat mengorganisir rakyat pedesaan untuk dapat bersaing dengan pihak luar dalam produk-produk desa. Terdapat dua pendekatan pembangunan perdesaan yaitu pembangunan dari atas dan pembangunan dari bawah (Brinkerhoff, 1985; Gao, 2016). Pembangunan dari atas merujuk pada intervensi eksternal di pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pembangunan dari bawah merujuk pada inisiatif masyarakat desa yang dapat memberikan solusi dalam melaksanakan pembangunan. Di Indonesia konsep ini serupa dengan “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”.

KUD telah lama menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan di Indonesia. Sebagai wadah bagi para petani, KUD berperan krusial dalam menyediakan akses terhadap sumber daya produksi, memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, serta memberikan berbagai layanan sosial. Namun, dinamika perekonomian dan kebijakan pemerintah yang bertransformasi secara signifikan telah menguji keberadaan dan peran strategis KUD. Data menunjukkan peningkatan jumlah KUD secara konsisten hingga tahun 1997, namun mengalami penurunan drastis pasca krisis ekonomi 1997. Suradisastra (2006) mencatat terdapat penurunan signifikan dari 9.635 KUD pada tahun 1997 menjadi 9.216 KUD pada tahun 1998. Liberalisasi ekonomi dan pencabutan subsidi sebagai syarat penerimaan pinjaman siaga dari *International Monetary Fund* (IMF) semakin memperparah kondisi KUD. Kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap keberadaan dan peran KUD dalam perekonomian desa.

Kebijakan pencabutan subsidi dan liberalisasi ekonomi telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap keberadaan KUD. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, KUD menghadapi kesulitan dalam menjalankan usahanya. Salah satu dampak paling merugikan adalah penyusutan fasilitas kredit dari pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor pangan, pupuk, dan bibit. Wahyudi (2017) mencatat bahwa kebijakan pencabutan hak monopoli KUD telah mengakibatkan KUD kehilangan akses terhadap sumber pendanaan yang krusial. Hilangnya fasilitas kredit, terutama dalam distribusi pupuk,

telah melemahkan daya saing KUD. KUD yang umumnya memiliki modal terbatas kesulitan bersaing dengan distributor non-KUD yang memiliki modal lebih kuat.



Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Koperasi di Indonesia Tahun 1986 – 2001

Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Non-KUD di Indonesia dari tahun 1986 hingga 2001. Secara keseluruhan, jumlah KUD relatif stabil dan mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi tidak signifikan. Di sisi lain, jumlah koperasi non-KUD terus meningkat secara signifikan setiap tahun, terutama setelah tahun 1993. Pada tahun 1986, jumlah KUD tercatat sebanyak 7.250 unit. Sepanjang periode yang ditampilkan, jumlah KUD cenderung stabil di kisaran 7.000 hingga 9.000 unit. Peningkatan jumlah KUD terjadi secara bertahap dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan jumlah 9.216 unit. Namun, setelah itu terjadi sedikit penurunan, dan pada tahun 2001, jumlah KUD turun menjadi 8.009 unit. Ini menunjukkan bahwa jumlah KUD tidak mengalami perkembangan yang pesat dan bahkan mengalami sedikit penurunan pada akhir periode. Pada tahun 1986, jumlah koperasi non-KUD tercatat sebanyak 22.255 unit, lebih besar dari jumlah KUD. Jumlah koperasi non-KUD terus meningkat setiap tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 2001 dengan jumlah 101.623 unit. Peningkatan terbesar terlihat setelah tahun 1993, di mana jumlah koperasi non-KUD bertambah signifikan hampir setiap tahun.

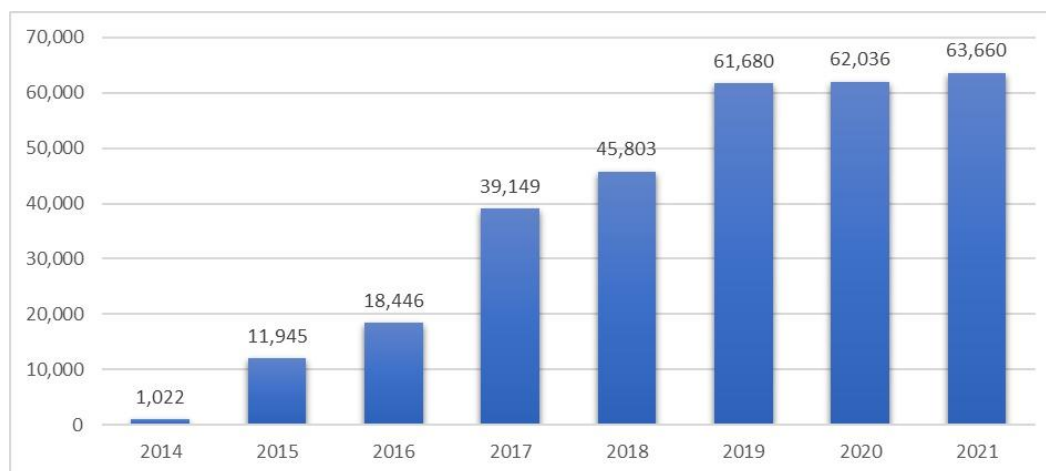
Pada tahun-tahun awal (1986 hingga awal 1990-an), meskipun koperasi non-KUD lebih banyak, perbedaannya dengan jumlah KUD masih relatif kecil. Namun, setelah tahun 1993, jumlah koperasi non-KUD mulai meningkat tajam, sementara jumlah KUD tetap stagnan atau hanya mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2001, perbedaan jumlah antara koperasi non-KUD dan KUD sangat besar, di mana koperasi non-KUD mencapai lebih dari 100.000 unit, sementara KUD hanya sekitar 8.000 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi non-KUD menjadi jenis koperasi yang lebih diminati dan berkembang lebih cepat di masyarakat. Jumlah KUD relatif stabil dan tidak mengalami peningkatan signifikan, koperasi non-KUD terus bertumbuh secara pesat, terutama sejak pertengahan 1990-an. Fenomena ini bisa mencerminkan adanya perubahan kebutuhan atau preferensi masyarakat yang lebih memilih jenis koperasi di luar KUD, atau bisa juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang lebih mendukung pengembangan koperasi non-KUD.

Penelitian Dewi dkk. (2017) mengungkapkan adanya heterogenitas kondisi KUD yang tidak aktif. Sebagian KUD masih menjalankan kegiatan usaha dalam skala yang terbatas, sementara sebagian lainnya telah sepenuhnya menghentikan operasional. Temuan ini diperkuat oleh Riswan dkk. (2017) yang menggarisbawahi kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUD nonaktif. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan pengetahuan menjadi hambatan utama dalam upaya revitalisasi. Proses

pengaktifan kembali KUD tidak dapat dilakukan secara instan. Revitalisasi koperasi memerlukan pendekatan yang bertahap dan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing KUD. Herawati (2016) menekankan pentingnya melibatkan dukungan pihak eksternal dalam proses revitalisasi. Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan revitalisasi yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi koperasi dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Konsep KUD memiliki kesamaan dengan konsep *Community Based Enterprises* (CBE). CBE menekankan partisipasi masyarakat serta bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lokal secara lebih luas (Soviana, 2015). Selain itu, KUD memiliki kesamaan dengan CBE karena modal KUD berasal dari komunitas. CBE menekankan keterlibatan aktif masyarakat serta bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat lokal secara lebih luas (Soviana, 2015). KUD tidak disebut sebagai CBE karena hanya melayani kepentingan anggotanya, bukan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam "konsep manajemen" antara KUD dan CBE, yang menuntut pendekatan berbeda dalam memahami KUD.

Konsep BUMDes memiliki kesamaan dengan konsep *Social Enterprise* (SE). SE merupakan model bisnis hibrida yang menggabungkan tujuan sosial dan ekonomi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zahra dkk., 2009). BUMDes (*Village-Owned Enterprises*) dan SE memiliki kesamaan dalam menggabungkan tujuan sosial dan keuntungan finansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lokal. Kegiatan SE tidak hanya berfokus pada profit finansial, tetapi juga menyeimbangkannya dengan kegiatan yang berorientasi pada nilai sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Vazquez-Maguirre & Portales, 2018). SE dibentuk untuk mengatasi masalah sosial dan menghasilkan keuntungan finansial melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Widiastuti dkk., 2019).



Sumber : Kementerian Desa PDTT, 2024

Gambar 2. Perkembangan Jumlah BUMDes 2014 – 2018

Berdasarkan Gambar 2 maka dapat dilihat perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2021. Pada tahun 2014, jumlah BUMDes masih sangat rendah, hanya terdapat 1.022 unit. Jumlah BUMDes mengalami peningkatan pesat pada tahun 2015 menjadi 11.945 unit, menunjukkan adanya dorongan signifikan untuk pendirian BUMDes dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, BUMDes terus bertambah menjadi 18.446 unit, yang menunjukkan bahwa perkembangan masih cukup konsisten, meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun 2015. Terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2017, dengan jumlah BUMDes mencapai 39.149 unit, yang hampir dua kali lipat dari jumlah di tahun 2016. Ini mengindikasikan adanya dorongan yang kuat dalam pendirian BUMDes pada tahun tersebut. Jumlah BUMDes meningkat tahun 2018 menjadi

45.803 unit, meskipun kenaikannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Terdapat peningkatan tajam pada tahun 2019 dengan jumlah BUMDes mencapai 61.680 unit. Peningkatan ini menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes. Peningkatan jumlah BUMDes mulai melambat pada tahun 2020-2021, dengan jumlah mencapai 62.036 pada tahun 2020 dan sedikit naik menjadi 63.660 unit pada tahun 2021.

BUMDes merupakan bentuk kewirausahaan sosial di desa yang diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan kemandirian desa (Kania dkk., 2021). Keberadaan BUMDes akan membentuk wirausaha desa yang dapat menjadi penggerak perekonomian. Hal ini pada akhirnya dapat menarik investasi ke desa dan mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah (Khoirunurrofik, 2020). Kewirausahaan sosial berbasis lokal, seperti BUMDes, seringkali dikemukakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan (Ranjan, 2015). Namun, beberapa penelitian menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi usaha lokal, seperti status usaha tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sistem pengelolaan yang tidak memadai, kualitas modal manusia yang relatif rendah, kendala dalam mencapai skala produksi dan distribusi yang efisien serta keterbatasan penerapan teknologi modern (Tunberg, 2014; Wessels & Nel, 2016).

Koperasi dan BUMDes merupakan dua pilar penting dalam perekonomian desa yang memiliki keterikatan langsung dengan masyarakat. Meskipun demikian, muncul kekhawatiran bahwa kehadiran BUMDes mengancam eksistensi koperasi, terutama setelah pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan BUMDes dalam beberapa tahun terakhir (Putra, 2017; Sumarwoto, 2022). Perbedaan dukungan pendanaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang memicu persepsi tersebut. Koperasi umumnya mengandalkan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk memperkuat modal usahanya. Namun, alokasi dana bergulir untuk koperasi cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat tidak ada alokasi pada tahun 2016.

Berbeda dengan koperasi, BUMDes menerima dukungan pendanaan yang lebih signifikan melalui transfer dana desa. Alokasi dana desa untuk BUMDes mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan BUMDes. Dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemberdayaan masyarakat (Arifin dkk., 2020). Hal ini memungkinkan pemerintah memberikan dukungan permodalan secara langsung kepada BUMDes dalam rangka memperkuat ekonomi desa.

Crowding effect antara BUMDes dan KUD di Indonesia mencerminkan persaingan yang muncul akibat peran ekonomi kedua entitas ini di pedesaan. BUMDes, yang didukung oleh kebijakan desa seperti Dana Desa, telah berkembang sebagai penggerak ekonomi baru di desa, menciptakan unit bisnis yang inovatif dan sering kali lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dibandingkan KUD. Misalnya, beberapa BUMDes berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha seperti pariwisata, pengelolaan sampah, dan pengembangan UMKM lokal (Larasdiputra dkk., 2019; Puri & Khoirunurrofik, 2021). Di sisi lain, KUD, yang telah ada sejak masa Orde Baru, menghadapi tantangan regenerasi pengurus dan modernisasi usaha. Banyak KUD yang kurang inovatif, terutama karena pengelolaannya sering kali dijalankan oleh generasi yang lebih tua. Namun, KUD tetap relevan, khususnya jika mampu berinovasi seperti meningkatkan layanan pembiayaan dan memanfaatkan tren bisnis baru (Sumarwoto, 2022).

Persaingan ini sering kali dianggap sebagai *crowding effect* karena BUMDes cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemerintah dibandingkan KUD. Namun, para ahli menyarankan potensi kolaborasi antara keduanya untuk menciptakan sinergi, sehingga kedua entitas tersebut tidak hanya bersaing tetapi juga saling melengkapi (Prabowo, 2014; Srirejeki, 2018; Zuhdiyaty & Syafitri, 2019). Teori *crowding effect* dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kehadiran BUMDes sebagai entitas bisnis desa yang baru dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap keberadaan KUD. Berdasarkan teori mikroekonomi, konsep *crowding-out* dan *crowding-in* mengindikasikan apakah kompetisi dengan berdirinya (*entry*) BUMDes justru akan menyebabkan

existing unit usaha keluar (*exit*) yang adanya efek *crowding-out* dari BUMDes, atau sebaliknya akan bersifat komplementer dan meningkatkan kinerja unit usaha *existing* yang berarti justru terjadi *crowding-in*.

BUMDes berpotensi untuk memberikan efek *crowding out* bagi KUD jika BUMDes menawarkan produk atau jasa yang serupa dengan KUD, namun dengan efisiensi dan inovasi yang lebih tinggi, sehingga menarik minat anggota dan pelanggan KUD untuk beralih. Di sisi lain, BUMDes juga dapat memberikan efek *crowding in* bagi KUD dengan cara menciptakan iklim kompetisi yang sehat sehingga mendorong KUD untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya.

Hingga kini, belum ada studi empiris yang menunjukkan hubungan pendirian BUMDes terhadap keberadaan KUD memiliki efek dominan *crowding in* atau *crowding out*. Secara umum, Tabel 1 memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik antara BUMDes dan KUD dimana dalam hal kelembagaan dan keterlibatan administrasi pemerintahan desa, KUD bersifat *bottom-up* dari masyarakat, sementara BUMDes lebih bersifat intervensi *top-down* yang juga didukung oleh pendanaan dari transfer dari Dana Desa.

Tabel 1.
Perbandingan Karakteristik BUMDes dan KUD

Aspek Perbandingan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Sumber
Kelembagaan	Berbasis keanggotaan, bersifat terbuka dan sukarela	Dibentuk oleh pemerintah desa, bersifat wajib	UU Desa nomor 6 tahun 2014, UU 25/1992 tentang Perkoperasian (Arifin dkk., 2020; Nadia & Mahi, 2023; Nugroho dkk., 2021; Puri & Khoirunurrofik, 2021; Rokhim dkk., 2017; Suradisastra, 2006; Wahyudi, 2017)
Fungsi	Melayani kebutuhan ekonomi anggota koperasi	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan usaha	
Pengambilan Keputusan	Berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, satu orang anggota satu suara (Rapat Anggota Tahunan)	Berdasarkan keputusan bersama pemerintah desa dan masyarakat (musyawarah desa)	
Sumber Pendanaan	Simpanan anggota, pinjaman, hasil usaha	Aset desa, pinjaman, hasil usaha, dana desa	
Administrasi Pemerintahan Desa	Mandiri, namun dapat bekerja sama dengan pemerintah desa	Terintegrasi dengan pemerintahan desa, tunduk pada peraturan desa	

Sumber: Data Penelitian, 2024

Penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa pendirian BUMDes memiliki pengaruh positif terhadap keberadaan KUD melalui efek *crowding in*, di mana BUMDes justru dapat mendorong peningkatan jumlah KUD. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan terkait BUMDes dan KUD di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan baik BUMDes maupun KUD akan lebih maju dan profesional dalam mengelola bisnis dan dapat meningkatkan perekonomian desa di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan hasil penelitian ini akan berkontribusi pada pelaksanaan sistem ekonomi pedesaan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode empiris kualitatif dengan data *field survey*, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut melalui metode empiris kuantitatif dalam mengkaji hubungan pendirian BUMDes terhadap keberadaan KUD serta efek yang terjadi pada ekonomi pedesaan. Dengan memahami interaksi antara BUMDes dan KUD maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan ekonomi di tingkat desa serta implikasi kebijakan yang relevan. Selain itu, untuk melengkapi dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis ingin meneliti lebih lanjut serta melihat secara agregat dampak pendirian BUMDes sebagai entitas bisnis baru terhadap keberadaan KUD di Indonesia. Selain itu peneliti juga ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

dominasi efek *crowding out* atau *crowding in* dari pendirian BUMDes terhadap keberadaan KUD di Indonesia.

Peran pendirian BUMDes terhadap keberadaan KUD di Indonesia sejalan dengan teori *crowding effect* dalam ekonomi. Teori *crowding effect* dalam konteks ini mengindikasikan bahwa pendirian BUMDes sebagai entitas bisnis desa yang baru dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap keberadaan KUD. BUMDes berpotensi untuk memberikan efek *crowding out* bagi KUD dalam hal akses terhadap sumber daya, baik itu sumber daya finansial, sumber daya manusia, maupun pasar. Hal ini dapat terjadi jika BUMDes menawarkan produk atau jasa yang serupa dengan KUD, namun dengan efisiensi dan inovasi yang lebih tinggi, sehingga menarik minat anggota dan pelanggan KUD untuk beralih. Di sisi lain, BUMDes juga dapat memberikan efek *crowding in* bagi KUD dengan cara menciptakan iklim kompetisi yang sehat, mendorong KUD untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya. Kolaborasi antara BUMDes dan KUD dalam bentuk kemitraan atau joint venture juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk saling melengkapi dan memperkuat posisi masing-masing dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Penelitian ini menggunakan integrasi data sekunder dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (Potensi Desa), Kementerian Desa PDTT (Badan Usaha Milik Desa), Kementerian Dalam Negeri (Total Penduduk Desa), dan Kementerian Keuangan (Dana Desa). Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode ekonometri regresi data panel *fixed effect* untuk sampel desa di seluruh Indonesia pada periode 2014, 2018 dan 2021 (Khandker dkk., 2010). Pendekatan regresi data panel *fixed effect* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan akurat mengenai pengaruh pendirian BUMDes terhadap keberadaan KUD di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data pada penelitian ini mencakup data seluruh desa di Indonesia pada periode tahun 2014-2021. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk *unbalanced* (jumlah sampel desa per tahun berbeda). Data desa menggunakan kode Desa 10 digit yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Data bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam melihat perkembangan jumlah KUD dan BUMDes, pemilihan tahun dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2021 dengan pertimbangan adanya UU Desa tahun 2014 untuk program pengembangan BUMDes. Di samping itu pemilihan periode tahun 2014, 2018 dan 2021 mengikuti ketersediaan data yang cukup lengkap dari semua sumber data penelitian ini.

Model empiris penelitian yang digunakan adalah *pooled OLS* dan regresi *panel fixed effect*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$KUD_{it} = \beta_0 + \beta_1 BD_{it} + \beta_2 X_{it} + \delta_i + \mu_t + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

KUD_{it} : Jumlah KUD desa i pada tahun t

BD_{it} : *dummy* keberadaan BUMDes desa i tahun t, bernilai 1 jika ada BUMDes dan bernilai 0 jika tidak ada BUMDes.

X_{it} : variabel kontrol terdiri dari realisasi dana desa, pendidikan kepala dan sekretaris desa, jumlah koperasi non KUD, total unit usaha BUMDes, total penduduk per desa dan lembaga keuangan bank di setiap desa.

β_0 : Konstanta

μ_t : *Fixed Effect* tahun

t : data tahun

δ_i : *Fixed Effect* desa

i : data desa

ε_{it} : *Error term*

Analisis regresi menggunakan data panel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan *cross-section* dan *time-series* dalam mengatasi *omitted variable bias* dimana hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam *cross-section* atau *time series* (Baltagi, 2005). Selain itu data panel dapat menjelaskan heterogenitas individu untuk mengurangi risiko mendapatkan hasil yang bias (Baltagi, 2005; Hsiao, 2007). Regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu melalui *pooled least square*, *random effect model* dan *fixed effect model*. Penelitian ini menggunakan regresi data panel *fixed effect* dengan pertimbangan bahwa penggunaan *fixed effect* dapat mengatasi bias yang berasal dari variabel/faktor yang bersifat *time invariant* yang tidak dapat diobservasi (*unobserved heterogeneity*) dalam model. Model *fixed effect* dapat memungkinkan *individual effect* dan atau *time specific effect* untuk dikorelasikan dengan variabel penjelas, X_{it} (Hsiao, 2007).

Variabel δ_i merepresentasikan *fixed effect* desa, yang merupakan karakteristik khusus desa yang tidak berubah sepanjang waktu tetapi dapat memengaruhi variabel KUD_{it} dan BD_{it} . Contohnya termasuk infrastruktur desa, budaya koperasi, dan potensi ekonomi lokal. Definisi μ_t : Variabel μ_t adalah *fixed effect* tahun yang mengakomodasi faktor-faktor umum yang memengaruhi semua desa pada tahun tertentu, seperti kebijakan pemerintah pusat atau kondisi ekonomi makro. Mengacu pada Wooldridge (2022: 463), pendekatan *fixed effect* digunakan untuk mengatasi potensi bias yang muncul karena korelasi antara variabel bebas (BD_{it}, X_{it}) dengan efek tetap (δ_i). Dengan ini, karakteristik unik desa yang tidak terobservasi dapat diestimasi secara konsisten. Besaran *fixed effect* (δ_i dan μ_t) tidak diestimasi secara eksplisit tetapi dikeluarkan melalui transformasi *differencing* dalam proses estimasi model. Pendekatan ini menghilangkan bias dari variabel yang tidak berubah antar waktu. Mengacu pada (Wooldridge, 2022), pendekatan *fixed effect* digunakan untuk mengatasi potensi bias yang muncul karena korelasi antara variabel bebas (BD_{it}, X_{it}) dengan efek tetap (δ_i). Dengan ini, karakteristik unik desa yang tidak terobservasi dapat diestimasi secara konsisten. Besaran *fixed effect* (δ_i dan μ_t) tidak diestimasi secara eksplisit tetapi dikeluarkan melalui transformasi *differencing* dalam proses estimasi model. Pendekatan ini menghilangkan bias dari variabel yang tidak berubah antar waktu.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam mengukur keberadaan KUD dapat menggunakan jumlah KUD tahun 2014, 2018 dan 2021. Jumlah KUD ini dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Potensi Desa. Penelitian ini menggunakan jumlah KUD dalam satuan unit dari tahun 2014, 2018 dan 2021 dalam melihat peran pendirian BUMDes terhadap pembangunan desa. Variabel independen utama untuk penelitian ini terdiri pendirian BUMDes di setiap desa. BUMDes merupakan salah satu program prioritas utama dari pemanfaatan dana desa dalam rangka program pemberdayaan masyarakat desa.

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah dana desa, pendidikan kepala desa, pendidikan sekretaris desa, unit usaha total BUMDes, total penduduk, lembaga keuangan perbankan serta jumlah koperasi non KUD. Dana Desa merupakan pendapatan desa terbesar untuk pembangunan desa baik fisik maupun non fisik dan juga merupakan sumber modal utama untuk mendirikan, menumbuhkan, dan mengembangkan BUMDes (Arifin dkk., 2020). Kepala desa dan sekretaris desa sebagai pemimpin lokal sangat berkaitan erat dengan keberhasilan dari pembangunan desa. Desa-desa yang dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi (minimal jenjang menengah atas) cenderung memiliki status yang lebih mandiri, berkembang, dan maju dibandingkan dengan desa-desa yang dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah (Nadia & Mahi, 2023). Jumlah koperasi non KUD juga menjadi variabel kontrol yang penting dalam penelitian ini. Keberadaan koperasi non KUD di desa membuat performa KUD menjadi turun secara signifikan pada tahun 1995-2001 (Riswan dkk., 2017; Suradisastira, 2006).

Pengujian model regresi dilakukan melalui uji F, uji t, uji koefisien determinasi. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009). Uji t digunakan untuk melihat variabel independen yang

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai seberapa baik model regresi mampu menjelaskan data atau dikenal dengan *goodness of fit* (Gujarati & Porter, 2009). Batasan nilai koefisien determinasi antara nol dan satu (Wooldridge, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa kementerian/lembaga yaitu Kementerian Desa PDTT, BPS, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Penggabungan kode Desa dari masing-masing kementerian menggunakan ID berupa 10 digit kode desa. Tabel 2 menunjukkan ringkasan nilai statistik variabel-variabel penelitian dari tahun 2014, 2018 dan 2021 yang terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dengan jumlah observasi sebanyak 232.866.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
KUD (unit)	232866	0,967	1,863	0	33
BUMDes (unit)	232866	0,459	0,498	0	1
Dana_Desa (log)	232866	13,249	10,57	0	23,445
KOPINKRA (unit)	232866	0,030	0,390	0	40
KOSPIN (unit)	232866	0,395	1,643	0	54
Koperasi_Lainnya	232866	0,197	1,203	0	60
EDUCKades (<i>dummy</i>)	232866	0,883	0,321	0	1
EDUCSekDes (<i>dummy</i>)	232866	0,941	0,240	0	1
UnitUsahaTotal (unit)	232866	1,405	2,520	0	33
TotalPenduduk (jiwa)	232866	1511,970	1163,340	100	4700
BankPemerintah (unit)	232866	0,161	0,681	0	48
BankSwasta (unit)	232866	0,071	0,671	0	65
BPR (unit)	232866	0,071	0,511	0	56

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, variabel utama yaitu jumlah KUD, memiliki rata-rata sebesar 0,967 dengan standar deviasi 1,863, menunjukkan distribusi yang cukup lebar dengan nilai minimum 0 dan maksimum 33 unit KUD. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar desa, keberadaan KUD masih terbatas, meskipun terdapat beberapa desa yang memiliki jumlah KUD dengan jumlah signifikan. Sementara itu, variabel BUMDes yang berupa variabel *dummy* memiliki rata-rata sebesar 0,459 yang menunjukkan bahwa sekitar 45,9% desa dalam data memiliki BUMDes. Standar deviasi sebesar 0,498 mengindikasikan penyebaran data yang merata antara desa yang memiliki dan tidak memiliki BUMDes. Variabel Dana Desa memiliki rata-rata alokasi sebesar 13,249 (dalam juta rupiah dan logaritma), dengan nilai maksimum mencapai 23,445 juta, mencerminkan variasi dalam alokasi dana antar wilayah.

Variabel lain seperti Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) dan Koperasi_Lainnya menunjukkan keberagaman dengan masing-masing nilai rata-rata sebesar 0,395 dan 0,197, namun dengan standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu 1,643 dan 1,203. Total unit usaha BUMDes di tingkat desa memiliki rata-rata 1,405, mencerminkan adanya berbagai aktivitas ekonomi lain yang berjalan di dalam pendirian BUMDes. Sekitar 88,3% kepala desa memiliki tingkat pendidikan (SMA sampai dengan S3),

menunjukkan bahwa sebagian besar kepala desa sudah memiliki tingkat pendidikan setara SMA/lebih. Variasi antar desa sebesar 0,321 mencerminkan adanya desa-desa yang kepala desanya lebih berpendidikan dibandingkan yang lain. Sekitar 94,1 persen sekretaris desa memiliki tingkat pendidikan SMA ke atas (sampai dengan S3). Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kepala desa, namun menunjukkan bahwa mayoritas sekretaris desa sudah memiliki pendidikan SMA ke atas. Sementara itu, jumlah penduduk desa, dengan rata-rata 1512 jiwa per desa, menunjukkan variasi yang signifikan dan dapat memengaruhi dinamika ekonomi lokal.

Dari perspektif institusi perbankan wilayah pedesaan meliputi Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing menunjukkan keberadaan yang rendah (rata-rata di bawah 0,2), mencerminkan keterbatasan akses perbankan formal di tingkat desa. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa terdapat variasi signifikan dalam karakteristik desa-desa di Indonesia yang dapat memengaruhi interaksi antara pendirian BUMDes dan keberadaan KUD, baik melalui efek sinergi (*crowding in*) maupun kompetisi (*crowding out*).

Tabel 3.
Hasil Estimasi Model Regresi OLS

POOLED OLS	OLS 1	OLS 2	OLS 3	OLS 4	OLS 5
	KUD	KUD	KUD	KUD	KUD
BUMDes	1,937*** (213,650)	1,932*** (212,780)	1,917*** (208,230)	0,509*** (62,400)	0,509*** (62,390)
Dana_Desa	0,002*** (3,740)	0,002*** (4,490)	0,002*** (5,190)	0,005*** (14,890)	0,005*** (14,900)
KOPINKRA		-0,020* (-2,350)	-0,020* (-2,400)	-0,041*** (-6,310)	-0,041*** (-6,310)
KOSPIN		0,017*** (8,180)	0,016*** (7,730)	-0,007*** (-4,420)	-0,007*** (-4,420)
Koperasi_Lainnya		0,013*** (4,740)	0,012*** (4,430)	-0,006** (-2,900)	-0,006** (-2,900)
EDUCKades			0,065*** (5,940)	0,062*** (7,250)	0,062*** (7,240)
EDUCSekDes			0,083*** (5,580)	0,057*** (4,830)	0,056*** (4,820)
UnitUsahaTotal				0,474*** (377,340)	0,474*** (377,310)
TotalPenduduk					0,000 (0,610)
_cons	0,057*** -10,820	0,047*** -8,630	-0,085*** (-5,700)	-0,101*** (-8,610)	-0,103*** (-8,460)
N	232866	232866	232866	232866	232866
R ²	0,275	0,275	0,276	0,550	0,550

Standard errors in parentheses * $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

Sumber: Data Penelitian, 2024

Tabel 3 merupakan hasil analisis regresi menggunakan metode *pooled* OLS yang menunjukkan bahwa pendirian BUMDes memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah KUD di Indonesia. Pada model estimasi OLS 1 hingga OLS 3, koefisien variabel BUMDes secara konsisten menunjukkan nilai yang positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen (1,937, 1,932, dan 1,917). Hal ini

mengindikasikan bahwa keberadaan BUMDes cenderung mendorong peningkatan jumlah KUD, yang dapat diinterpretasikan sebagai efek *crowding in*. Namun, pada model estimasi OLS 4 dan OLS 5, setelah memasukkan variabel kontrol total unit usaha BUMDes dan total penduduk setiap desa, koefisien BUMDes menurun drastis menjadi 0,509 tetapi tetap signifikan, menunjukkan bahwa efek positif tersebut melemah setelah memperhitungkan variabel kontrol tambahan.

Variabel Dana Desa juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KUD di semua model dengan koefisien yang meningkat secara bertahap, dari 0,00190 di OLS 1 menjadi 0,00505 di OLS 5. Ini menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal, termasuk keberadaan KUD. Sementara itu, variabel lain seperti KOPINKRA menunjukkan hubungan negatif signifikan dengan jumlah KUD di semua model, yang mencerminkan adanya kompetisi atau substitusi antara KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat) dan KUD. Sebaliknya, KOSPIN memiliki hubungan positif dan signifikan pada model awal, namun menjadi negatif setelah memasukkan lebih banyak variabel kontrol pada model OLS 4 dan OLS 5.

Koefisien positif signifikan pendidikan Kepala Desa (0,0622) dan Sekretaris Desa (0,0564) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perangkat desa tersebut berkontribusi positif signifikan terhadap keberadaan KUD. Jumlah unit usaha BUMDes secara keseluruhan di desa (UnitUsahaTotal) memiliki koefisien positif dan signifikan di semua model, menunjukkan peran signifikan aktivitas ekonomi desa dalam mendukung keberadaan KUD. *R-squared* meningkat dari 0,275 pada model estimasi OLS 1 hingga 0,55 pada OLS 4 dan OLS 5 yang menunjukkan bahwa model dengan variabel kontrol tambahan memiliki kemampuan penjelasan variasi jumlah KUD yang lebih baik.

Tabel 4.
Hasil Estimasi Model Regresi OLS, RE, FE

	OLS 6	Random Effect	Fixed Effect
	KUD	KUD	KUD
BUMDes	0,509*** (62,440)	0,509*** (62,440)	0,147*** (19,260)
Dana_Des	0,005*** (14,900)	0,005*** (14,900)	0,011*** (21,830)
KOPINKRA	-0,041*** (-6,250)	-0,041*** (-6,250)	0,006 (1,030)
KOSPIN	-0,006*** (-3,800)	-0,006*** (-3,800)	-0,001 (-0,690)
Koperasi_Lainnya	-0,006** (-2,600)	-0,006** (-2,600)	-0,003 (-0,150)
TotalPenduduk	0,001 (0,630)	0,001 (0,630)	0,001* (2,220)
UnitUsahaTotal	0,474*** (377,180)	0,474*** (377,180)	0,478*** (417,460)
EDUCKades	0,062*** (7,260)	0,062*** (7,260)	0,049*** (6,190)
EDUCSekDes	0,057*** (4,840)	0,057*** (4,840)	0,043*** (4,070)
BankPemerintah	-0,008 (-1,630)	-0,008 (-1,630)	-0,009* (-2,160)
BankSwasta	0,019*** (4,180)	0,019*** (4,180)	0,007 (1,730)
BPR	-0,019***	-0,019***	-0,011*

	OLS 6	Random Effect	Fixed Effect
	KUD	KUD	KUD
	(-3,500)	(-3,500)	(-2,230)
_cons	-0,104***	-0,104***	-0,007
	(-8,480)	(-8,480)	(-0,540)
N	232866	232866	232866
R ²	0,550		0,554

Standard errors in parentheses * $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil analisis regresi pada Tabel 4 menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), *Random Effect* (RE), dan *Fixed Effect* (FE) menunjukkan bahwa pendirian BUMDes memiliki pengaruh positif signifikan terhadap jumlah KUD di Indonesia. Pada model OLS dan RE, koefisien variabel BUMDes adalah 0,509, yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dengan jumlah KUD, mendukung adanya potensi efek *crowding in*. Namun, pada model FE, nilai koefisien menurun menjadi 0,147, meskipun tetap signifikan, yang menunjukkan bahwa efek positif dari BUMDes terhadap KUD melemah setelah memperhitungkan heterogenitas antar desa.

Variabel Dana Desa secara konsisten memiliki pengaruh positif dan signifikan di semua model, dengan koefisien berkisar dari 0,005 (OLS) hingga 0,011 (FE). Hasil ini menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa berkontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan KUD. Di sisi lain, variabel KOPINKRA menunjukkan hubungan negatif yang signifikan pada OLS dan RE, namun menjadi tidak signifikan pada FE, mengindikasikan bahwa hubungan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor karakteristik tetap desa.

Sementara itu, variabel KOSPIN menunjukkan hubungan negatif signifikan pada OLS dan RE, tetapi tidak signifikan pada FE. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan koperasi simpan pinjam dapat bersifat substitusi terhadap KUD dalam konteks tertentu. Unit usaha BUMDes secara keseluruhan di desa (UnitUsahaTotal) memiliki koefisien yang besar dan signifikan di semua model, menunjukkan peran penting aktivitas BUMDes dalam mendukung keberadaan KUD. Variabel kontrol lainnya, seperti tingkat pendidikan kepala desa (EDUCKades) dan sekretaris desa (EDUCSekDes), juga menunjukkan hubungan positif signifikan di semua model yang menegaskan bahwa kualitas aparatur desa berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan KUD. R² pada OLS (0,550) dan FE (0,554) menunjukkan kemampuan model yang cukup baik dalam menjelaskan variasi jumlah KUD. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pendirian BUMDes berpotensi mendukung keberadaan KUD melalui efek *crowding in* maupun netral, namun efek tersebut dapat bervariasi tergantung pada karakteristik desa dan keberadaan institusi ekonomi lainnya.

Dalam analisis ekonometrika, *robustness check* dilakukan dengan menggunakan berbagai metode estimasi untuk melihat apakah hasil koefisien tetap konsisten di berbagai model. Pada Tabel 3 dan Tabel 4., *robustness check* dilakukan dengan membandingkan hasil dari tiga metode regresi, yaitu *Pooled Ordinary Least Squares* (OLS), *Fixed Effects* (FE), dan *Random Effects* (RE). Ketiga model tersebut digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel-variabel independen (seperti BUMDes, Dana Desa, KOPINKRA, KOSPIN, Koperasi Lainnya, EDUCKades, EDUCSekDes, UnitUsahaTotal, TotalPenduduk, BankPemerintah, BankSwasta dan BPR) terhadap variabel dependen (KUD) tetap konsisten meskipun ada perubahan metode estimasi.

Pada model *Pooled OLS*, hasil menunjukkan bahwa pendirian BUMDes memiliki koefisien positif yang sangat signifikan (OLS 1 hingga OLS 5: 1,936*** hingga 0,510***). Hal ini mengindikasikan efek pendirian BUMDes tetap kuat meskipun variabel-variabel lain dimasukkan, seperti Dana Desa, KOPINKRA, KOSPIN, Koperasi Lainnya, EDUCKades, EDUCSekDes,

UnitUsahaTotal, dan TotalPenduduk. Signifikansi variabel Dana Desa pada semua model juga menegaskan bahwa alokasi dana tersebut mendukung keberadaan KUD, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan BUMDes.

Pada model *Fixed Effect* (FE) yang mempertimbangkan variasi antar wilayah (desa, kabupaten, kecamatan), pendirian BUMDes tetap memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien yang lebih kecil dibandingkan *Pooled OLS* (FE Desa: 0,149***). Konsistensi ini menunjukkan bahwa pengaruh pendirian BUMDes terhadap KUD tidak hanya terjadi secara agregat tetapi juga pada tingkat lokal. Variabel Dana Desa juga tetap signifikan, dengan koefisien positif pada semua model FE, menegaskan pentingnya dana desa dalam memperkuat institusi ekonomi lokal.

Uji *robustness* dengan penambahan variabel lain, seperti jumlah populasi (TotalPenduduk), unit usaha BUMDes secara keseluruhan, tingkat pendidikan aparatur desa, keberadaan koperasi non KUD serta lembaga keuangan perbankan di desa, menunjukkan pengaruh yang bervariasi. Beberapa variabel seperti EDUCKades, EDUCSekDes dan UnitUsahaTotal menunjukkan koefisien positif yang signifikan, menandakan bahwa kualitas kepemimpinan desa, manajemen desa dan aktivitas unit usaha BUMDes memiliki hubungan positif dengan keberadaan KUD. Sebaliknya, KOPINKRA dan KOSPIN menunjukkan koefisien negatif pada sebagian besar model, yang dapat mengindikasikan adanya persaingan antara KUD dan koperasi lain di tingkat lokal. Hasil ini menguatkan bahwa pendirian BUMDes tidak hanya mendorong KUD secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan institusional di wilayah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa pendirian BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis baru di desa, tetapi juga berperan penting dalam mendukung dan memperkuat KUD (potensi *crowding in effect*). BUMDes dan KUD dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini penting mengingat banyak desa di Indonesia yang masih bergantung pada sektor pertanian dan memiliki potensi sumber daya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Metode estimasi untuk penelitian ini menggunakan regresi data panel *fixed effect* dengan data sampel desa seluruh Indonesia (*unbalanced panel data*) periode tahun 2014, 2018 dan 2021. Peran positif keberadaan BUMDes sebagai organisasi ekonomi berbasis desa sejalan dengan teori pembangunan pedesaan neo endogen dimana adanya penggalan dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal yang melibatkan kekuatan *bottom-up* (Pemerintah Daerah) serta kekuatan *top-down* (Pemerintah Pusat). BUMDes dapat membantu KUD dalam mengelola sumber daya lokal secara lebih efektif. Dengan dukungan dari BUMDes, KUD dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu dalam hal produk, pasar maupun inovasi. Hal ini merupakan potensi efek *crowding in* yang akan meningkatkan daya saing serta investasi melalui KUD di desa secara lebih luas.

Adapun penelitian ini belum secara mendalam menganalisis aspek finansial pendirian BUMDes serta kinerja keuangan BUMDes dan KUD, termasuk pendapatan, profitabilitas, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan temuan penelitian mengenai potensi *crowding in* antara BUMDes dan KUD, disarankan beberapa kebijakan strategis yang selaras dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25 Tahun 2015. Pertama, perlu adanya penguatan kerja sama lokal melalui inisiatif pemerintah daerah untuk memfasilitasi kolaborasi usaha berbasis potensi desa sesuai UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87. Kedua, optimalisasi revitalisasi KUD dapat dicapai melalui program pelatihan bersama yang komprehensif, mencakup aspek manajemen, teknologi, dan pemasaran. Ketiga, integrasi program pendanaan desa dengan program revitalisasi koperasi perlu

dilakukan untuk membentuk unit usaha kolaboratif yang lebih efektif dan efisien UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 89.

REFERENSI

- Anggraeni, N., & Yudiantoro, D. (2022). Peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam akuntabilitas dana desa dan kinerja aparatur di Desa Tulungrejo. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(05), 643-650. <https://doi.org/10.24843/EEB.2022.v11.i05.p12>
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djuned, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Berita Resmi Statistik*, 47(07). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd Edition). John Wiley & Sons Inc., New York.
- Brinkerhoff, D. W. (1985). Development From Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries. Edited by W. B. Stöhr and D. R. Fraser Taylor. Wiley, Chichester, 1981, 488 pp. *Public Administration and Development*, 5(1), 86-88. <https://doi.org/10.1002/pad.4230050112>
- Dewi, V. S., Lestari, D. A. H., & Adawiyah, R. (2017). Kinerja, Kesejahteraan Anggota, dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 5, 76-83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v5i1.1677>
- Putra, H.F. (2017). Daya Ungkit Kolaborasi BUM Desa dan Koperasi. *Kopkun Institute*.
- Gao, Y. (2016). Top-Down and Bottom-Up Processes for Rural Development and The Role of Architects in Yunnan, China. *Buildings*, 6(4), 47. <https://doi.org/10.3390/buildings6040047>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. (2009). *Basic Econometrics*. Mc Graw-Hill International Edition.
- Hsiao, C. (2007). Panel Data Analysis—Advantages and Challenges. *TEST*, 16(1), 1-22. <https://doi.org/10.1007/s11749-007-0046-x>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship through Village-Owned Enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2010). *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8028-4>
- Khoirunrofik. (2020). *Kerjasama Antar Desa bagi Penguatan Inovasi dan Kewirausahaan menuju Kemandirian Ekonomi Desa*. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/kerjasama-antar-desa-bagi-penguatan-inovasi-dan-kewirausahaan-men>
- Larasdiputra, G. D., Anggiriawan, D. B., Kawisana, B., & Putra, T. (2019). The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 60-66. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.41>
- Motives, Search Processes and Ethical Challenges. *Journal of Business Venturing*, 24(5), 519-532. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.04.007>
- Nadia, A., & Mahi, B. R. (2023). Village Development: Effect of Village Fund and Village Head Education. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.66675>
- Nugroho, T. W., Hanani, N., Toiba, H., Sujarwo, & Purnomo, M. (2021). Post-Tourism in Booming Indonesian Rural Tourism Industry. A Social Representation Theory Approach. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(1), 288-301. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1\(49\).25](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.1(49).25)
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing BUMDes (Village-Owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal*, 30(30 A), 19-26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Pranadji, T. (2016). Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(2), 128-142. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1387>
- Puri, I. T., & Khoirunrofik. (2021). Economics Development Analysis Journal The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) for The Village Community Economy Article Info. *Economics Development Analysis Journal*, 10(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ranjan, R. (2015). Rural Entrepreneurism and Developmental Outcomes Under Climate Change Threats. *Climate and Development*, 7(4), 353-366. <https://doi.org/10.1080/17565529.2014.951016>
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization Model for Village Unit Cooperative in Indonesia. *European Research Studies Journal*, XX(Issue 4A), 102-123. <https://doi.org/10.35808/ersj/822>

- Rokhim, R., Wahyuni, S., Wulandari, P., & Ayu, F. (2017). Analyzing key success factors of local economic development in several remote areas in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 11(4), 438–455. <https://doi.org/10.1108/JEC-09-2015-0049>
- Sari, L. P., & Arka, S. (2023). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat, Tenaga Kerja Dan Teknologi Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(02), 309. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i02.p16>
- Soviana, S. (2015). Cooperative, Social Enterprise, and Community-Based Enterprise: Competing, Substituting, or Complementing? *Management and Organizational Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.5430/mos.v2n2p1>
- Srirejeki, K. (2018). Empowering The Role of Village Owned Enterprises. *Journal of Accounting, Management, and Economics*, 20, 5–10. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jame>
- Sumarwoto. (2022). Akankah KUD “tersingkir” oleh perkembangan BUMDes? <https://www.antaraneews.com/berita/>.
- Suradisastra, K. (2006). *Agricultural Cooperative in Indonesia*.
- Tifa Foundation. (2018). Memperkuat Lembaga Ekonomi Desa, Meningkatkan Partisipasi Kelompok Terpinggirkan dalam Tata Kelola Ekonomi. *TifaFoundation*. <https://www.tifafoundation.id/artikel/memperkuat-lembaga-ekonomi-desa-meningkatkan-partisipasi-kelompok-terpinggirkan-dalam-tata-kelola-ekonomi/>
- Tunberg, M. (2014). Approaching Rural Firm Growth: A Literature Review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 8(4), 261–286. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2013-0039>
- Vazquez-Maguirre, M., & Portales, L. (2018). Profits and Purpose: Organizational Tensions in Social Enterprises. *Intangible Capital*, 14(4), 604. <https://doi.org/10.3926/ic.1208>
- Wahyudi, J. (2017). Kontribusi Koperasi dalam Upaya Pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus KUD Bahagia Kabupaten Pati). *Proceeding-the 6th University Research Colloquium: Seri Humaniora, Sosial, dan Agama*, 9–16.
- Wessels, J., & Nel, E. (2016). A New Co-Operative Revolution in South Africa? Reflections on The Outcomes of State Support in The Free State Province. *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 31(1–2), 187–203. <https://doi.org/10.1177/0269094215621731>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22((2)), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*.
- Wooldridge, J. M. (2022). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MITPress.
- Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A Typology of Social Entrepreneurs:
- Zuhdiyaty, N., & Syafitri, W. (2019). Analysis Of BUMDes Strengthening For Community Welfare With The SLA Approach (Case Study Of Kalipucang Village, Tutur, Pasuruan). *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8, 2. www.ijstr.org